



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 ini dapat kami selesaikan.

Renja Tahun Anggaran 2022 merupakan rencana jangka pendek Sekretariat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2022 karena berisi program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bontang. Renja Sekretariat Daerah juga akan bermanfaat sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah baik secara interim maupun secara komprehensif karena akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Renja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Semoga Renja Sekretariat Daerah menjadi acuan utama dalam menentukan program, kegiatan dan pagu anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Bontang, Agustus 2021

Sekretaris Daerah



**Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT**  
NIP. 19651022 199203 2 008

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 ini dapat kami selesaikan.

Renja Tahun Anggaran 2022 merupakan rencana jangka pendek Sekretariat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2022 karena berisi program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bontang. Renja Sekretariat Daerah juga akan bermanfaat sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah baik secara interim maupun secara komprehensif karena akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Renja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Semoga Renja Sekretariat Daerah menjadi acuan utama dalam menentukan program, kegiatan dan pagu anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Ir Hj. S. Nurul Hidayati, MM.	Asisten Administrasi Umum	A.
2	Drs.Baharuddin A, M.Si	Kepala Bagian Umum	b.
3	Punagi .SH	Kepala Sub Bagian Keuangan	f

Bontang, Agustus 2021

Sekretaris Daerah



Ir. Hi. Aji Erlynawati, MT  
NIP. 19651022 199203 2 008

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....</b>	<b>6</b>
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA .....	6-10
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH .....	11
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH.....	11-10
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWALI RKPD .....	12-16
<b>BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH .....</b>	<b>17</b>
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	17-18
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	19
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>20</b>
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF .....	20-27
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (PD) yang biasa disebut Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud implementasi dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusunan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Kerja sebelumnya.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Rencana Kerja untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjembatani antara perencanaan PD dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis RPJMD dan Renja PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.
2. Dokumen Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.
3. Rencana Kerja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
4. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4578);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi,Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Bontang Nomor 55 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Disamping itu juga merupakan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021, spesifik mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang Tahun 2021. Dengan demikian program dan kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD dan Renstra Sekretariat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan Sekretariat Daerah dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terakomodir dalam renja Sekretariat Daerah Kota Bontang selama tahun 2022 yang merupakan kebijakan Pemerintah Kota dalam menunjang misi pemerintah daerah.

**1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah,

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Program dan Kegiatan serta pagu indikatif.

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH.**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah Membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif daerah dan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Kota Bontang. Dalam merancang program dan kegiatan pada Rencana Kerja ini, kinerja Rencana Kerja tahun 2020 wajib dievaluasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas capaian kinerja Rencana Kerja 2022 (Tahun n-1) sebagaimana terlampir di Tabel 2.1.

Rencana Kerja Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2022

TABEL 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kode	Usrus/Bidang Usrusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d bulan 2017		Target	Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Program/Kegiatan renja PD tahun berjalan 2021	Target	Pencapaian realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2019	
				Realisasi	Tingkat Realisasi (%)						realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
04.01.00	SEKRETARIAT DAERAH											
04.01.01	PROGRAM PENJANGKARAN DAERAH											
04.01.01.02.01	PENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KEBERKAWALANAN											
04.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	30	30	30	100	1	99	230	60	
4.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1	12	12	100	3	30	60			
4.01.202.01	Pengadanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS dan Non PNS	120	40	40	100	120	83	207,5			
4.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	5	5	100	1	19	380,00			
4.01.202.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Anggaran	1	44	44	100	1	152	345,45			
4.01.202.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.01.202.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ambou Pakaian Dinas yang	Jumlah Pakaian Dinas yang	14	2000	2000	100	14	3500	46,67			
4.01.202.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang	7	4	4	100	7	6	30,00			
4.01.202.10	Sosialisasi Pemutuan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi yang	5	593	593	100	5	2076	46,66			
4.01.202.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8	100	100	100	20	222	222,00			
4.01.202.02	Penyediaan Perakitan dan Perangkapan Kantor	Jumlah perakitan dan perangkapan kantor yang	48	6	6	100	48	9	225,00			
4.01.202.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik yang	9	90	90	100	9	305	338,88			
4.01.202.05	Penyediaan Barang Cetak dan Administrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	8				8					
4.01.202.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Permintaan	Jumlah bahan bacaan yang	4				4					
4.01.202.09	Penyediaan Jasa Konsultansi dan Pengawasan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	400				400					



Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022

4.01.2.13.01	Pembinaan Organisasi	Jumlah kegiatan pengelohan jabatan	6	6	kegiatan	6	39	300
4.01.2.13.02	Taksonomi Pelayanan Publik dan Tata	kegiatan publik dan jumlah kegiatan fasilitasi	4	4	kegiatan	1	80	200
4.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	kegiatan publik dan jumlah kegiatan pengelohan jabatan	3	3	kegiatan	1	18	300
4.01.2.14.01	Komunikasi Pimpinan	Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah	290	290	kegiatan		571	185,98
4.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah pertemuan antara pimpinan / wakil pimpinan	6	6	kegiatan		81	100
4.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	480	480	kegiatan		8	100
	<b>DAN KESJAJHARAN RAKYAT</b>							
	<b>ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>							
4.01.2.20.01	Pembinaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan	2	2	kegiatan		10	60
4.01.2.20.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	kegiatan pelayanan HUT RI, HUT Provinsi, HUT OTDA dan HUT Kota	4	4	kegiatan		436	60
4.01.2.20.03		Jumlah peserta Sosialisasi UU Kewilayahan	2	2	kegiatan			
4.01.2.20.03		Jumlah pertemuan Daerah dan Niala LPPD	1	1	dokumen			100
4.01.2.20.03	Fasilitasi Pelaksanaan Organisasi Daerah	Pembinaan pelayanan HUT Kabupaten	40	40	orang			
4.01.2.20.01	Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pengujian rumah yang diinspeksi	2.223	2.223	orang			
4.01.2.20.01	Fasilitas Pengelohan Bina Mental Spiritual	Jumlah Operasional Rumah ibadah yang diinspeksi	10	10	kegiatan			
4.01.2.20.01		Jumlah kegiatan Keagamaan	5	5	kegiatan			
4.01.2.20.02		Jumlah pembinaan UKS	60	60	sokoh			40
4.01.2.20.02		Jumlah Koordinator dan Administrasi BAZ	6	6	orang			
4.01.2.20.02		Jumlah kegiatan kemas	3	3	kegiatan			
4.01.2.20.03		Jumlah Penorasi	500	500	orang			300
4.01.2.20.03		Jumlah Pemertama Hibah	25	25	permertama hibah			
4.01.2.20.03		Jumlah Pemertama Hibah	12	12	asrama			
4.01.2.20.03		Jumlah Sewa Asrama	12	12	asrama			
4.01.2.20.03		Jumlah Pemertama Hibah	25	25	permertama hibah			
4.01.2.20.03		Jumlah Pemertama Hibah	12	12	asrama			



## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Analisis kinerja pelayanan yang dimaksud merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, standar pelayanan minimal/standar nasional tidak ditetapkan. Oleh karena itu analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang tidak disajikan.

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH**

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2016-2021, bahwa Sekretariat Daerah merupakan suatu wadah organisasi publik yang memiliki tujuan memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan roda organisasinya. Disamping peran dan kewenangan yang dimiliki serta berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah juga menghadapi berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal sesuai kewenangannya.

Hasil telaahan isu-isu strategis RPJMD Kota Bontang 2016-2021 berdasarkan prioritas janji politik Kepala Daerah terpilih RPJPD Kota Bontang, RPJMD Provinsi dan RPJMN yang selanjutnya menjadi isu-isu strategis pembangunan Kota Bontang. Formulasi isu-isu strategis RPJMD Kota Bontang 2016 - 2021 adalah *pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, pariwisata*. Sedangkan komitmen bersama yang ditetapkan adalah *infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan oleh pemerintah, pendidikan dan kesehatan*.

Berdasarkan formulasi diatas, secara keseluruhan isu-isu strategis tersebut berkorelasi dengan tupoksi Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok *membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian organisasi perangkat daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kota Bontang*. Sedangkan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tupoksi Sekretariat Daerah adalah *kesejahteraan sosial*.

## ***Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022***

---

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal (RENJA 2021) pada Sekretariat Daerah dengan jumlah Program 6, 19 Kegiatan dan Sub Kegiatan 67 sedangkan hasil analisis kebutuhan 2022 menjadi 6 Program dan 67 Kegiatan:









### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen Bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional 2005-2025 mengartikan Visi Indonesia Tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang Pelaksanaannya dibagi 4 (Empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang keempat yang arahnya digariskan dalam rencana Pembangunan jangka pembangunan Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Visi Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
  2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
  9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  
  
Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2022 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
- Pendekatan Penyusunan RKP 2022 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:
- Pengendalian perencanaan
  - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2022
  - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
  - Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

**3. 2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

**3.2.1 Tujuan**

Tujuan yang ditetapkan Sekretariat Daerah untuk tahun 2016 - 2021 sebanyak 2 (Dua) tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik
- b. Meningkatkan kualitas administrasi pembangunan

**3.2.2 Sasaran**

Berdasarkan Rencana Strategis Tujuan jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, ada 5 (Lima) Sasaran yang akan diwujudkan Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota
- b. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah
- c. Meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah
- d. Meningkatnya harmonisasi kebijakan perekonomian daerah
- e. Terwujudnya pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF**

Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2022 memuat 3 Program, 19 Kegiatan dan 58 Sub kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 114.841.579.271 (*Seratus Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dituangkan dalam Tabel.4.1. Sebagai Berikut:















## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah memiliki arti sangat penting dalam menganalisis berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menyikapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Sebagai salah satu bagian dari RKPD Kota Bontang, Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan salah satu pendukung dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak ke masyarakat.

Output Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah Program Tahunan Sekretariat Daerah yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Sekretariat Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bontang.

Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh segenap manajemen dan staf Sekretariat Daerah Kota Bontang sehingga akan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Walaupun Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2022 ini masih relatif jauh dari sempurna, diharapkan substansi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan optimal. Diharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.